

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hasil Hutan Bukan Kayu

¹Hesty Tambajong; ²Umiyati Haris; ³Fransin Kontu; ⁴Hubertus Oja; ⁵Melia Pasaribu

¹⁻⁵. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

Email. tambajong@unmus.ac.id

Abstrak

Hasil hutan bukan kayu memberikan nilai positif bagi perekonomian masyarakat jika dikelolah secara maksimal, akan tetapi potensi hasil hutan bukan kayu belum maksimal dikelola sehingga belum memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung wasur secara potensial kewilasaan memiliki bergam potensi hasil hutan bukan kayu antara lain minyak kayu putih, sarang semut, dan anggrek Potensi tersebut selama ini dikelolah secara langsung oleh masyarakat kampung yang difasilitasi oleh Balai Taman Nasional Wasur namun pengelolaannya belum dilakukan secara maksimal karena fasilitas diperlukan oleh masyarakat belum memadai bahkan ada yang sudah tidak berfungsi (rusak). Hal ini yang menyebabkan sebagian potensi hasil hutan bukan kayu sekarang ini tidak dilanjutkan pengelolaannya. Untuk pengawasan sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di Kampung Wasur belum dilakukan secara optimal oleh Balai Taman Nasional Wasur. Pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung Wasur pada Balai Taman Nasional Wasur sudah berjalan dengan baik, akan tetapi didalam pengelolaanya masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang mereka gunakan dalam pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mengalami kerusakan, dan kurannya sumber daya manusia yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengelola HHBK..

Kata Kunci: Pengawasan; Pengelolaan, Sumber Daya Alam; HHBK

Abstract

Bureaucratic reform is needed because the model of government and public services requires changes and a modernization system in the government system which is considered not to have gone well as it should for the purpose of bureaucratic reform, therefore real and structured efforts are needed in order to be able to change bureaucratic systems and procedures starting from the aspect of institutional organization, attitude/ behavior. In this study the aims were to determine the implementation of the restructuring model in the Bojonegoro Regency regional apparatus organizations and to find out effective policies for restructuring regional apparatuses. The research method used is descriptive qualitative using analytical tools in the form of interviews and literature studies to determine the restructuring system modeling approach implemented in Bojonegoro Regency. The results of the research show that the restructuring in Bojonegoro Regency has been carried out in accordance with the established legal basis. The restructuring agenda is an urgency for improving public service governance. In 41 OPDs such as the Communication and Informatics Office, the Education Office, the Social Service and the Fire Service and 37 other services. The restructuring of several of these agencies was carried out by using the departmentalization and work specialization models, optimizing technology in the form of G-Sinjab to create new organizational dimensions, as well as improving the governance of Human Resources for Apparatuses in Bojonegoro Regency to support the realization of Good Governance through the regional apparatus restructuring agenda in Bojonegoro Regency .

Keywords: Control; Management; Natural Resources; NTFPs

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara pemilik hutan terbesar di dunia dengan luas kawasan hutan sebesar 120,7 juta ha (“Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan (PKTL),” 2018). Namun, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi deforestasi yang disebabkan oleh kegiatan manusia diantaranya illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik kepentingan yang tidak lagi mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Kondisi tersebut menyebabkan semakin menurunnya pasokan kayu, sehingga perlu dilakukan upaya pengelolaan hutan salah satunya adalah dengan meningkatkan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Hasil hutan yang sangat besar potensi untuk dimanfaatkan adalah produk hasil hutan bukan kayu (HHBK). Oleh karena potensi yang besar, maka perlu tata kelola yang baik agar peran dan keterlibatan semua pihak menjadi jelas dan hasil produk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan nasional. HHBK memberikan manfaat multiguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal di sekitar hutan. Pengelolaan hutan perlu dilakukan untuk menyediakan kesempatan kerja yang memadai dan memberikan akses bagi masyarakat sekitar hutan untuk memungut HHBK (Puspitojati, 2011) .

Papua adalah sebuah pulau terbesar yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan melimpah. Dengan luas wilayah yang besar maka tentunya Kabupaten Merauke memiliki sumber daya alam yang juga sangat besar dan banyak, terutama sumber daya alam hasil hutan bukan kayu (HHKB) khususnya di hutan. hal tersebut merupakan hubungan timbal balik antara manusia dan alam. Dalam pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu yang ada dikampung Wasur masyarakat bukan lagi sebagai objek, namun masyarakat adalah sebagai subjek

Kawasan TN Wasur sebagian besar menjadi perwakilan lahan basah terluas di Papua (Kosmaryandi, 2012). Lahan basah yang luas menjadi salah satu keutamaan TN Wasur dibandingkan Taman Nasional lain di Indonesia yang salah satu fungsinya sebagai habitat burung-burung migran dari Australia dan Selandia Baru sehingga wilayah tersebut termasuk jaringan situs RAMSAR di dunia bersama dengan Taman Nasional Kakadu Australia dan Suaka Marga Satwa Tonda di Papua Nugini (Farmer, 2012). Hal ini menjadikan keanekaragaman jenis burung migran merupakan salah satu bagian dari potensi biodiversitas unggulan di dalam kawasan TN.Wasur konservasi yang meliputi hasil hutan serta habitatnya terutama habitat yang dilindungi pengawasan yang dilakukan dikawasan eksitu atau diluar kawasan hutan.

Balai taman nasional wasur memiliki tugas bersama-sama masyarakat untuk melindungi dan mengamankan hutan agar fungsi utama hutan tersebut tidak hilang serta dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, baik yang berada didalam kawasan TN Wasur maupun yang berada di luar kawasan TN Wasur. Kampung wasur memiliki kekayaan alam hasil hutan bukan kayu yang berpotensi untuk dikembangkan seperti, minyak kayu putih, beberapa jenis anggrek langka, dan sarang semut.

Pengelolaan sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu) belum dilakukan secara berkelanjutan, seperti pemberdayaan anggrek, sarang semut, dan pembuatan minyak kayu putih. Balai taman nasional wasur memiliki budidaya tanaman anggrek juga pendampingan minyak kayu putih namun belum berjalan secara optimal. Pengelolaan tersebut merupakan faktor utama dari bentuk usaha balai taman nasional wasur dalam upaya menjaga dan melestarikan sumber daya alam guna untuk bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Akan tetapi dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu) pasti masih terdapat permasalahan yang membuat pengelolaan sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu) belum optimal dalam pengelolaanya, serta fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat belum lengkap dalam mengelola sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu). Untuk itu dibutuhkan pengawasan untuk mengoptimalkan hasil hutan di kawasan Wasur.

Menurut (Herujito, 2006) definisi pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dalam praktek kita lihat, kegagalan suatu rencana bersumber pada dua hal, yaitu: akibat pengaruh diluar jangkauan manusia (*force major*); dan pelaku yang melakukan tidak memenuhi persyaratan yang diminta.

Pemerintah menerbitkan undang-undang no. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, yang mengatur dan melaksanakan proteksi atau perlindungan terhadap sumber daya alam, yaitu udara; tanah; air; pesisir dan keanekaragaman hayati laut. Kebijakan tersebut pada pasal 1 menguraikan bahwa Pengelolaan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Selain itu, pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu merupakan bentuk dari pelestarian hutan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan ini menjelaskan tentang pemanfaatan kawasan hutan baik kayu maupun bukan kayu serta jasa lingkungan oleh masyarakat sekitar dengan berlandaskan kelestarian (Satriadi et al., 2021).

Oleh karena pengelolaan sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu) di kampung wasur seringkali mengalami kegagalan, maka salah satu pengelolaan minyak kayu putih yang ada dikampung wasur mengalami kemacetan dalam berproduksi dikarena alat ataupun fasilitas yang mereka gunakan mengalami kerusakan. Sementara pengelolaan pemberdayaan anggrek masih belum optimal, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia. Banyak masyarakat yang mengelola sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu) tanpa melakukan daur ulang, yang menyebabkan terjadinya kerusakan bagi lingkungan, maupun tempat tinggal makluk lainnya. Adanya pembakaran –pembakaran hutan secara liar yang dilakukan masyarakat Pembakaran ini sering terjadi dalam kawasan konservasi seperti misalnya dalam Tanam Nasional Wasur. Hal tersebut yang menjadi urgensi dalam penelitian ini untuk melihat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya hasil hutan bukan kayu di Wasur.

Urgensi penelitian ini adalah ingin melihat pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Merauke dalam mengelola sumber daya alam hasil hutan bukan kayu. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya alam yang ada di wilayah Wasur sangat membutuhkan pengelolaan yang efektif dari pemerintah. Pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu menjadi hal yang penting untuk diteliti dalam bidang pengawasannya. Hal tersebut disebabkan karena sumber daya alam menjadi mata pencaharian penduduk lokal. Selain itu, sumber daya alam diperlukan adanya otoritas pengawasan agar keberadaannya tetap lestari dan keseimbangan ekosistem juga tetap terjaga. Untuk itu, tulisan ini dibuat untuk mengulas pengawasan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu yang ada di hutan Wasur.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah ‘bagaimana pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di Kampung Wasur pada Balai Taman Nasional Wasur?’. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul ‘Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dalam upaya konservasi daerah aliran sungai’ ditulis pada tahun 2013. Fokus utama penelitian tersebut adalah fokus tentang pengelolaan sumber daya alam yaitu aliran sungai. Sedangkan penelitian ini fokus pada pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu. Penelitian kedua berjudul ‘Pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dalam upaya konservasi daerah aliran sungai lumbuk langkap desa sukamaju kecamatan airnipis kabupaten bengkulu selatan’ yang ditulis pada tahun 2019. Penelitian tersebut fokus terhadap pemanfaatan sumberdaya alam, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pengawasannya. Selain itu, penelitian lainnya juga menyebutkan bahwa yang bertugas melakukan pengawasan adalah otoritas kehutanan. Adapun kendala yang ditemui dalam proses pengawasan adalah kurangnya personil; kurangnya infrastruktur; serta kesadaran masyarakat yang masih kurang (Faradiba et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data diperoleh melalui wawancara; observasi; dan studi dokumen. Informan yang ditetapkan adalah sebanyak 7 orang, yaitu: 1 orang kepala BTNW; 3 orang pegawai BTNW; 3 orang ketua kelompok, yang memberikan informasi terkait pengawasan pengelolaan sumber daya alam di kampung Wasur pada Balai Taman Nasional Wasur. Penelitian di lakukan pada Balai taman nasional wasur, tentang Pengawasan pengelolaan sumber daya alam dikampung wasur distrik Merauke kabupaten Merauke.

Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa aktivitas dalam suatu analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus –menerus sampai penelitian tersebut tuntas, sehingga data tersebut akhirnya jenuh dimana terdapat tiga hal utama yakni Reduksi Data; Penyajian Data; dan Penarikan Kesimpulan (Sugiyono, 2017). Pada tahapan reduksi data, setelah data dikumpulkan melalui hasil wawancara; observasi; studi dokumen, data dipilah sesuai dengan kepentingan penelitian dan yang mendukung untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk kalimat deskripsi hingga pada penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan dalam pengelolaan hutan wasur terdiri atas tiga tahapan, yaitu: Pemantauan; Pemeriksaan dan Penilaian. Bagian ini akan menguraikan data dan hasil analisis mengenai ketiga langkah pengawasan dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu di wilayah Wasur.

Pemantauan

Pemantauan dalam pengawasan sbagaimana kita ketahui bahwa salah satu teknik melakukan pengawasan, baik kepada pemerintah yang melaksanakan kegiatan dalam berbagai kelembagaan maupun yang dilihat dari aspek pelaksanaan kegiatan adalah

melakukan sesuatu pemantauan, baik dilakukan secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*). Melalui laporan dari pimpinan balai taman nasional wasur yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan di implementasikan dengan baik.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam melakukan pemantauan pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu pada indikator pemantauan dilaksanakan oleh setiap ketua kelompok. selanjutnya BTNW melakukan pemantauan 1 kali seminggu untuk melihat apa apa saja yang harus diperlukan oleh setiap kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dari ketua kelompok pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu bahwa pemantauan yang dilakukan oleh balai taman nasional wasur dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu adalah dengan melibatkan ketua kelompok dan anggota lainnya yang mengelola sumber daya alam tersebut untuk bekerja sama dalam membentuk unit usaha yang dikoordinasikan dan diawasi oleh balai taman nasional wasur. dengan adanya unit usaha kelompok tersebut baik dari pihak BTNW maupun masyarakat yang ada dikampung wasur dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kampung wasur. dengan unit usaha kelompok tersebut pendamping yang memiliki tanggung jawab dalam memantau secara langsung pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu lewat usaha kelompok ini. kemudian pemantauan juga sering dilakukan oleh BTNW terjun langsung kelapangan untuk memastikan tidak ada aktivitas masyarakat yang merusak sumber daya alam yang ada dikampung wasur, agar tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan kemaslahatan yang akan datang.

Selain itu ketua kelompok yang telah diberikan ketertiban dalam mengolah sumber daya alam hasil hutan bukan kayu tidak semena –mena diberikan keleluasaan oleh BTNW itu sendiri, akan tetapi diikat dengan aturan bahwa :masyarakat sekitar kampung wasur ketika akan mengelola sumber daya alam hasil hutan bukan kayu mengambil manfaat dari hutan dengan cara memanfaatkannya dengan baik. jadi bentuk pemantauannya dalam kegiatan pengawasan pengelolaan sumber daya alam bukan kayu tersebut dipantau langsung oleh balai tamam nasional wasur .

Dengan adanya usaha kelompok tersebut, masyarakat di kampung wasur merasa sangat terbantu. Selain menjadi sumber pendapatan masyarakat juga memudahkan BTNW dalam melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu tersebut. begitulah yang dirasakan oleh pernyataan DB sebagai kepala kampung sekaligus ketua kelopok teh sarang semut dalam unit usaha kelopok pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung wasur.

Penemuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam melakukan pemantauan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu) . Pemantauan yang dilakukan oleh BTNW dalam pengawasan terhadap pengelolaan hasil hutan bukan kayu terhadap usaha kelompok tersebut yaitu dengan memonitor jalanya organisasi dengan melibatkan setiap kelompok untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam(hasil hutan bukan kayu) dikampung wasur. Pemantauan mempunyai

peranan dan fungsi dalam menentukan keberhasilan suatu usaha. Melalui laporan dari pimpinan balai taman nasional wasur yang diberikan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, teknik pemantauan dalam pengawasan ini semua lembaga membutuhkannya agar program yang kita rencanakan di implementasikan dengan baik.

Pemantauan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu itu sepenuhnya diserahkan kepada ketua kelompok dan anggota lainnya sebagai pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu tersebut. Akan tetapi bukan berarti penyuluhan atau pendamping tidak terlibat dalam pemantauan pengelolaan sumber daya alam tersebut yang ada dikampung wasur, tetapi bentuk pengawasan yang dilakukan adalah memperhatikan kebutuhan setiap kelompok yang mereka butuhkan.

Pemantauan dalam pengawasan hasil hutan bukan kayu merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam. Secara umum, langkah-langkah pemantauan ini dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas seperti penambangan pasir, penggalian batu, ekstraksi tanah liat, dan lainnya dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan yang minimal. Salah satu langkah penting dalam tahapan pemantauan adalah penggunaan teknologi modern seperti sensor satelit dan sistem informasi geografis (SIG) untuk melacak perubahan lahan dan aktivitas manusia. Untuk meningkatkan pengawasan pengelolaan hasil hutan bukan kayu di wilayah Wasur, maka diperlukan dukungan penggunaan teknologi modern yang dapat mengumpulkan data secara langsung tentang aktivitas di lapangan dan mengidentifikasi pelanggaran potensial terhadap regulasi lingkungan.

Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan dalam pengawasan harus dapat memberikan saran informasi atau keterangan yang jelas dengan mengandung kebenaran. Disamping itu dapat pula memberikan keyakinan terhadap pihak lain tentang pemeriksaan yang dilakukan. Terkait dengan pemeriksaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan dikampung wasur bahwa pihak BTNW memberikan solusi, melakukan sosialisasi kelapangan memeriksa pengelolaan hasil hutan bukan kayu tersebut. Akan tetapi pemeriksaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu disertakan dengan kelompok usaha lainnya.

Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh informan inisial D.K terkait pemeriksaan yang dilakukan BTNW terhadap pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu, bahwa “Pemeriksaan dari pihak balai terkait pemeriksaan pengelolaan sumber daya alam ini, sudah berjalan dengan baik.” Hal yang serupa dengan jawaban informan inisial E.G, bahwa “Untuk pemeriksaan yang dilakukan balai sudah berjalan dengan lancar, selalu memberikan solusi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bahwa pemeriksaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu secara langsung turun kelapangan untuk memeriksa pengelolaan sumber daya alam apakah terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran dan sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kemudian dideskripsikan dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan

sepenuhnya oleh pendamping dari BTNW dan bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya dikampung wasur .pemeriksaan ini merupakan rutin di lakukan oleh BTNW dan kelompok masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya perusakan sumber daya alam serta memeriksa kondisi pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan melakukan penanaman pohon kembali jika terjadi penebagan secara terus menerus.keterlibatan setiap kelompok maupun masyarakat dalam melakukan pemeriksaan pengeloaan hasil hutan bukan kayu oleh pendamping BTNW dilandasi pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal dikampung wasur juga mengetahui potensi dan ancaman dan gangguan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang merusak,baik itu dari luar maupun kawasan kampung wasur.

Pemeriksaan pengelolaan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan sepenuhnya oleh pendamping dari BTNW dan bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya dikampung wasur . pemeriksaan ini merupakan rutin di lakukan oleh BTNW dan kelompok masyarakat sekitar untuk mencegah terjadinya perusakan sumber daya alam serta memeriksa kondisi pengelolaan hasil hutan bukan kayu dan melakukan penanaman pohon kembali jika terjadi penebagan secara terus menerus.keterlibatan setiap kelompok maupun masyarakat dalam melakukan pemeriksaan pengeloaan hasil hutan bukan kayu oleh pendamping BTNW dilandasi pemahaman bahwa masyarakat yang tinggal dikampung wasur juga mengetahui potensi dan ancaman dan gangguan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang merusak,baik itu dari luar maupun kawasan kampung wasur.

Langkah pemeriksaan ini menjadi penting dalam pengawasan pengelolaan hasil hutan bukan kayu di wilayah Wasur karena langkah ini bertujuan untuk mengetahui pola pemanfaatan lahan hutan di suatu area. Pola pemanfaatan di area penghasil minyak kayu putih tentu berbeda dengan area penghasil sagu. Seperti halnya pola pemanfaatan lahan agroforestri menjadi alternatif bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan ladang sebagai lahan pendukung tanaman agroforestri (Iqbal & Dwi, n.d.).

Penilaian

Teknik penilaian dalam pengawasan, bagaimana menentukan bahwa setiap pelaksanaan suatu pengawasan ,apakah itu berdasarkan dengan kebenaran atau dilaksanakan penyimpangan atau dengan kata lain bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagan. Teknik penilaian sebagian dari pengawasan terhadap pengawasan pelaksanaan suatu kegiatan tentunya harus dilakukan dengan cara yang tepat, adil, dan jujur dengan jiwa utama adalah kebenaran karena penilaian yang salah sangat berakibat negatif baik unsur pelaksanaan kegiatan maupun oknum pengawasan yang paling penting adalah organisasi yang bersangkutan baik dibidang pemerintahan atau publik, maupun dibidang swasta atau privat karena penilaian dapat dilakukan secara objektif maupun secara subjektif yang relatif.

Penilaian pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu yang dikelola secara langsung oleh kelompok usaha tidak terlepas dari kesadaran dan pola pikir masyarakat setemapt mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam . Dengan adanya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola

,melestarikan dan mengawasi pengelolaan sumber daya alam akan memudahkan BTNW dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat setempat dalam melakukan pengawasan pengelolaan sumber daya lam hasil hutan bukan kayu di kampung wasur agar sumber daya alam dikampung wasur tetap terjaga dengan baik. Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu adalah kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu

Terkait dengan kesadaran masyarakat dan pola pikir masyarakat setempat akan pentinya menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada dikampung wasur tidak terlepas dari peran BTNW dalam melakukan sosialisasi kepada kelompok usaha dan masyarakat setempat.mengenai pengawasan dalam pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung wasur melibatkan pihak BTNW dan kelompok usaha maupun masyarakat ikut berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu yang ada dikampung wasur .sehingga sumber daya alam yang ada dikampung wasur tetap terjaga.

Balai taman nasional wasur dalam melakukan Penilaian bertujuan untuk menganalisis dan interpretasi data atau keadaan untuk menentukan sejauh mana kemajuan dan keberhasilan BTNW dan kelompok usaha maupun masyarakat setempat terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung wasur . penilaian ini juga merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya suatu kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh BTNW dan anggota kelompok setempat.sebagai pengelola sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung wasur.

Penilaian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan interpretasi data atau keadaan untuk menentukan sejauh mana kemajuan dan keberhasilan BTNW dan kelompok usaha maupun masyarakat setempat terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung wasur .penilaian ini juga merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi tentang berhasil tidaknya suatu kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh BTNW dan anggota kelompok setempat.sebagai pengelola sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung wasur.

KESIMPULAN

Pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu di kampung Wasur pada Balai Taman Nasional Wasur sudah berjalan dengan baik, akan tetapi didalam pengelolaanya masih belum berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan fasilitas yang mereka gunakan dalam pengelolaan HHBK mengalami kerusakan, dan kurannya SDM yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam mengelola HHBK. Pemantauan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu yang dilakukan oleh balai taman nasional wasur, adalah dengan membentuk beberapa kelompok yaitu kelompok pemberdayaan aggrek, pembuatan minyak kayu putih, dan

teh sarang semut. Pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh pendamping dari balai taman nasional wasur bersama sama dengan melibatkan ketua kelompok usaha yang ada dikampung wasur dalam memantau pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu secara langsung turun kelapangan agar fungsi sumber daya alam tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Pemeriksaan yang dilakukan oleh balai taman nasional wasur dan anggota kelompok usaha dan masyarakat setempat dalam pengawasan pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan sebagai pemeriksaan pengamatan oleh BTNW dan kelompok usaha dengan cara memberikan solusi agar pengelolaan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu dikampung wasur menjadi tanggung jawab semua. Penilaian terhadap pengawasan pengelolaan sumber daya alam (hasil hutan bukan kayu) di kampung wasur pada balai taman nasional wasur dinilai efektif dan berhasil yang dilakukan BTNW dan kelompok usaha dan masyarakat setempat dimana tingkat kerusakan sumber daya alam hasil hutan bukan kayu sudah mengalami penurunan.

Sebagai rekomendasi penelitian, untuk meningkatkan efektivitas dari pengawasan pengelolaan hasil hutan bukan kayu, maka diperlukan sinergitas kerjasama dengan seluruh *stakeholder* terkait. Pengawasan pengelolaan hasil bukan kayu di kampung Wasur adalah tanggungjawab bersama sama baik dari pihak BTNW maupun kelompok usaha masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL). (2018). *Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia*. <https://www.menlhk.go.id/site/post/224>
- Faradiba, A., Susyanti, S., & Lahae, K. (2022). Tanggung Jawab Pengawasan Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Produksi Terbatas Mapongka Di Kabupaten Tana Toraja. *Jurnal Hukumk Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.33609>
- Farmer, A. (2012). *The Economics of Ecosystems and Biodiversity for Water and Wetlands*. Institute for European Environmental Policy (IEEP). <https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/pdf/cop11/ppt/cop11-ppt-192-farmer.pdf>
- Herujito, Y. M. (2006). *Dasar-Dasar Manajemen*. Grasindo.
- Iqbal, M., & Dwi, A. (n.d.). Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Masyarakat Lokal Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian Ekosistem Dipterokarpa*, 4(1), 2018.
- Kosmaryandi, N. (2012). *New Idea for National Park Zoning System: A Synthesis between Biodiversity Conservation and Customary Community's Tradition*. Bogor Agricultural University.
- Puspitojati, T. (2011). Persoalan definisi hutan dan hasil hutan dalam hubungannya dengan pengembangan HHBK melalui hutan tanaman. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 8(3), 210–227.

Satriadi, T., Hamidah, S., & Rahmat, A. (2021). *Buku Ajar Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu*. CV Banyubening Cipta Sejahtera. https://fahutan.ulm.ac.id/id/buku/bukuajar/18_pengelolaan_hhbk_buku_ajar.pdf

Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Metode R&D*. Alfabeta.